



## Resolusi Konflik Etnis Antara Madura dan Dayak di Sampit melalui Model Sinergi Integratif

Abdul Basit<sup>1\*</sup>, Bunyamin Maftuh<sup>2</sup>, Elly Malihah<sup>2</sup>, Nastiti Mufidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Panca Marga, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>3</sup>Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, IAIN Ponorogo, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/integralistik.v34i2.43306>

### Sejarah Artikel

Submitted 2023-03-16

Revised 2023-03-16

Accepted 2023-08-08

### Kata Kunci

Konflik Etnis; Etnis Madura dan Dayak; Model Sinergi Integratif

### Abstrak

Perbedaan sosial ekonomi dan sosial budaya sangat berpengaruh terhadap konflik manakala faktor stereotipe negatif, kecemburuan sosial dan gesekan SARA kian tak terbendung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah terkait resolusi konflik etnis antara Madura dan Dayak pada kasus Sampit melalui model sinergi integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis konten atau isi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlu adanya resolusi konflik yang melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perwakilan dari masyarakat. Model sinergi integratif berupa rekonsiliasi, rekonstruksi dan mediasi dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat menunjukkan hasil yang sangat positif dari kedua belah pihak. Penyelesaian masalah dengan sila keempat Pancasila ini menjadi bukti bahwa persoalan keberagaman masyarakat dapat diatasi dengan model sinergi integratif secara aktif dan bertanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai tindak lanjut resolusi konflik sosial, perlu adanya edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat yang kurang terdidik agar tidak mudah terhasut atau terpengaruh perilaku, sikap dan ucapan orang lain. Selain itu, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai juga menjadi penting untuk diimplementasikan secara langsung dan berkelanjutan di tengah masyarakat majemuk.

### Abstract

*Socio-economic and socio-cultural differences greatly influence conflict when negative stereotypes, social jealousy and SARA friction are increasingly unstoppable. Based on this background, the purpose of this study is related to ethnic conflict resolution between Madurese and Dayak in the Sampit case through an integrative synergy model. This study used a qualitative approach with library research methods. The data analysis technique uses content or content analysis. Based on the results of the research, it shows that there is a need for conflict resolution involving various elements, starting from the central government, regional governments and representatives from the community. The integrative synergy model in the form of reconciliation, reconstruction and mediation by prioritizing aspects of deliberation for consensus showed very positive results from both parties. Solving the problem with the fourth precept of Pancasila is proof that the problem of societal diversity can be overcome by an integrative synergy model that is active and responsible both horizontally and vertically. The conclusions in this study indicate that as a follow-up to social conflict resolution, it is necessary to provide education in the form of outreach to less educated people so that they are not easily incited or influenced by the behavior, attitudes and words of other people. In addition, tolerance, tolerance, mutual respect are important to be implemented directly and sustainably in a pluralistic society.*

\*Correspondence Author:

Jl. Geger Arum Baru No. 12 RT 04 RW 06 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung

E-mail: [abdulbasit10@upi.edu](mailto:abdulbasit10@upi.edu)

p-ISSN 0853-7208

e-ISSN 2549-5011

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari (*invariable phenomenon*) dalam kehidupan manusia karena ia merupakan bagian yang inheren dari eksistensi manusia itu sendiri (Halawa, 2022). Mengutip pernyataan kaum realis yang mengatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berkonflik dengan manusia lainnya. Hal ini karena manusia terlahir dengan sifat agresif didalam dirinya. Konflik sendiri dapat muncul karena adanya suatu isu utama yang dapat menjadi pemicu pecahnya suatu konflik (Alexandra, 2018). Sebab dapat dipahami bersama, gesekan antar perbedaan juga sangat rawan menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen seperti bangsa Indonesia. Konflik dapat terjadi sebagai akibat hubungan sosial dalam masyarakat terganggu. Latar belakang dugaan penyebab terjadinya konflik etnis sendiri dapat berangkat dari berbagai macam faktor seperti dugaan bahwa konflik etnis disebabkan karena adanya sebagian pihak yang menggunakan isu SARA sebagai pemicunya (Sukaryanto & Rahayu (2012; Alexandra, 2018; Sholeh, 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa stereotipe negatif terkadang juga kerap menjadi dasar pecahnya konflik sosial antar etnis. Selain penyebab lain yakni dari faktor ekonomi, etnis, sosial, dan agama (Sholeh 2022).

Kendatipun Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu alat pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sadar atau tidak bahwa sejatinya negara ini dibangun atas dasar perbedaan (Suprpto, 2018). Perbedaan yang dimaksud mulai dari agama, etnis, ras, bahasa, adat istiadat dan sebagainya diharapkan menjadi anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk terus dijaga, dirawat sehingga menjadi kekayaan bangsa. Hal ini kemudian harus dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat dan dibelajarkan serta diamalkan dari generasi ke generasi. Jika kekayaan tersebut tidak dipelihara dan dijaga dengan baik maka cenderung menimbulkan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara (Permana & Ahyani, 2020). Konflik adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Selain itu, penyebab terganggunya hubungan sosial masyarakat tersebut sangat bervariasi, misalnya adanya perbedaan kultur, etnis, agama, kelompok atau golongan, status sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan lain-lain (Riban dan Masóed, 2002; Aninsi, 2021). Salah satu konflik sosial yang sangat berbahaya adalah konflik

antar etnis. Konflik akan menguat manakala sejalan dengan multiplikasi kejadian konflik yang diberitakan melalui media massa (Ida & Dyson, 2015). Konflik antar etnis biasanya terjadinya karena adanya seorang individu dan kelompok masyarakat yang membanggakan etnisnya secara berlebihan (etnosentrisme) seperti yang terjadi di Sampit. Namun, Gurr (1970) memiliki pandangan berbeda bahwa konflik etnis sebenarnya lebih disebabkan oleh gagalnya institusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga terjadi kesenjangan baik secara ekonomi maupun sosial politik antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya. Sehingga dengan kata lain, akar-akar penyebab konflik etnis tidak bisa dilihat dari satu faktor karena konflik etnis adalah suatu konflik yang cukup kompleks.

Selain itu, etnonasionalisme yang dianggap sebagai the native warga sampit juga berpengaruh terhadap penerimaan sosial warga etnis Madura selaku stranger (Sukaryanto & Rahayu, 2012). Konflik sosial ini tidak terbatas oleh wilayah administrasi, melainkan masyarakat yang berasal dari wilayah lain juga terlibat seperti Sambas, Palangkaraya dan daerah lainnya (Sukaryanto & Rahayu, 2012). Perang Sampit dan Madura tahun 2001 merupakan salah satu contoh konflik sosial di Indonesia, peristiwa ini terjadi antara etnis Dayak dan Madura pada akhir tahun 2000 hingga Februari 2001 dengan menelan korban 500 orang Madura dan lebih dari 100.000 dari mereka mengungsi keluar Sampit (Sayyaf, 2023). Akibat dari tragedi ini tidak hanya berkaitan dengan jatuhnya korban dan harta benda (sosial ekonomi) melainkan juga trauma yang sangat mendalam bagi para korban (Rosyidi, 2018). Latar belakang etnis Madura untuk tetap tinggal di Kalimantan Barat pasca konflik tahun 1997 ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pribadi dan juga keluarga, istri bagi suami bagi etnis Madura adalah hal yang berharga untuk di tinggalkan kembali ke daerah asalnya. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pribadi manusia seperti kebutuhan hidup, mata pencaharian sangatlah penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup (Juwanda dan Saffanah 2019).

Pluralitas bangsa Indonesia seringkali dianggap sebagai modal dasar pembangunan nasional. Namun bersamaan dengan itu sering kali menjadi ancaman integrasi nasional yang sangat berbahaya dan terpecah belah. Sehingga sangat perlu melihat budaya yang dimiliki kedua kelompok masyarakat yang terlibat konflik, sebagai akar untuk meninjau penyebab permasalahan,

dengan melakukan pemetaan penyebab konflik (Atem 2022). Oleh karena itu, sudah seyogyanya antar masyarakat termasuk pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang kurang terdidik berkenaan dengan pentingnya toleransi, memiliki rasa dan kesamaan senasib, kesamaan tanggungjawab, ada keadilan, saling menghargai, dan saling menerima satu sama lain, baik antar suku/ras, agama, aliran, aspirasi, golongan, maupun yang lain-lain. Menurut Nadzifah dalam penyelesaian perang Sampit, pemerintah menerapkan cara untuk mengevakuasi warga, terus meningkatkan keamanan, mengadakan rehabilitasi mental, dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik (Nadzifah 2022).

Secara teoritis, masyarakat bisa terintegrasi manakala: *Pertama*, individu yang menjadi anggota masyarakat mengalami rasa memiliki sebagai suatu kelompok sosial atau kolektivitas berdasarkan antara lain atas norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan yang disepakati bersama. *Kedua*, aktivitas maupun fungsi dari institusi atau subsistem di dalam suatu masyarakat lebih saling melengkapi daripada saling berlawanan satu dengan lainnya. *Ketiga*, adanya lembaga tertentu yang menganjurkan untuk saling mengisi atau mengimbangi dan mengkoordinir aktivitas dari berbagai subsistem dari masyarakat itu sendiri.

Dalam hal konflik antar etnis Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Tengah yang menelan ratusan korban jiwa, memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan hancurnya banyak harta benda itu, terdapat berbagai perspektif yang mencoba menjelaskannya. Bagi orang Madura, sebagaimana tercermin dalam sinyalemen Basra (Badan Silaturrahmi Ulama Madura), konflik antar etnis di Sampit mengarah pada sentimen agama. Tetapi bagi orang Dayak, pada khususnya dan warga Kalteng non-Madura pada umumnya, konflik itu murni konflik antar etnis (Kalteng Pos, 26 Februari 2001). Fenomena negosiasi identitas antar individu Dayak dan Madura dapat diperhatikan melalui pengakuan dan ekspresi identitas kultural dalam pergaulan sehari-hari serta melalui upaya negosiasi identitas kultural dalam rekonsiliasi konflik (Prathama 2017).

Pendapat kalangan Dayak yang lebih komprehensif terlihat dalam laporan tentang Konflik Etnik Sampit, Kronologi, Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis Saran, yang dibuat oleh Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT). Dalam poin ke tiga laporan itu disebutkan fakta-fakta menunjukkan bahwa adanya suatu

rencana penguasaan atau kolonisasi secara paksa/kekerasan sehingga status konflik tidak hanya antar etnik, tetapi juga bersifat aksi “penguasaan suatu wilayah” secara berencana. Selain itu, kelangkaan sumber daya alam dapat pula menghasilkan konflik kekerasan dalam suatu negara, terutama di wilayah yang ditempat tersebut sedang berlangsung perselisihan kewilayahan, “kepemilikan” dan kontrol atas sumber daya alam (Nur 2018). Konflik itu juga dilihat dalam kerangka usaha pihak tertentu untuk mengobok-obok dan meningkatkan disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu untuk selalu mendorong dan membuka ruang untuk melakukan sosialisasi politik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kelompok masyarakat atau etnis, utamanya terkait nilai-nilai nasionalisme, toleransi dan persatuan Indonesia (Hamdani 2022). Selain itu Saily Mochtar melihat konflik yang terjadi di Kalteng itu bukan sebagai konflik agama, bukan konflik karena kecemburuan ekonomi, bukan pula konflik antara Dayak dan Madura. Konflik ini adalah konflik antara masyarakat Kalteng dengan sekelompok masyarakat etnis Madura yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan norma perilaku masyarakat umum yang hidup berdampingan dan tidak profesionalnya penegakan hukum. Watak yang temperamental dan kebiasaan membawa senjata tajam mungkin juga menjadi salah satu penyebabnya (Kalteng Pos, 22 Maret 2001). Selain itu menurut Khadijah salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antarbudaya antara Etnis Dayak dan Etnis Madura adalah karena masyarakat Madura kurang bisa membaaur dengan masyarakat Melayu (Khadijah 2018).

Namun berdasarkan hasil penelitian dari Bashori et al (2012) dipaparkan bahwa meskipun sebagai minoritas kualitas integrasi etnis Madura (41,7%) lebih tinggi dibandingkan dengan etnis Dayak (7,1%). Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara dua etnis tersebut adalah adanya arogansi etnis tertentu (Madura) yang dianggap lebih unggul dalam hal sosial ekonomi masyarakat di Kalimantan (Bashori, Majid, dan Tago 2012). Hasil penelitian ini menarik sebab ternyata masyarakat Madura yang ada di Sampit betul-betul tidak lagi memperlakukan perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka dengan kelompok etnik di luar kelompok etnik mereka, selalu berusaha beradaptasi, berkompromi dan memiliki toleransi terhadap mereka. Ini juga berarti lebih banyak anggota kelompok etnik Madura dibanding anggota kelompok etnik Dayak yang memiliki banyak pengala-

man bekerjasama, solidaritas dan harapan serta kesediaan untuk bekerjasama serta memiliki pengalaman bersama yang baru dengan kelompok etnik di luar mereka.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah penelitian bibliografi dengan sistemik ilmiah dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan beragam bahan bibliografi yang dihubungkan dengan sasaran penelitian (Danandjaja, 2014). Penelitian kepustakaan dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil data terkait resolusi konflik etnis antara madura dan dayak di sampit melalui model sinergi integratif. Untuk melakukan penelitian kepustakaan, seorang peneliti harus mengikuti beberapa langkah yang terkandung di dalam penelitian kepustakaan. Langkah di dalam penelitian kepustakaan, yaitu 1) menentukan topik penelitian, 2) mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan obyek penelitian, 3) melakukan pemfokusan penelitian, 4) mencari dokumen (bahan bacaan) dan mengklasifikasikan dokumen yang sudah diperoleh, 5) peneliti membuat suatu catatan penelitian, 6) melakukan review dokumen, 7) mengklasifikasikan dokumen kembali dan yang terakhir yaitu menyusun atau menulis laporan (Zed, 2004).

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi (artikel jurnal, prosiding nasional maupun internasional, buku atau e-bok, disertasi, tesis, media online dan cetak, majalah dan lain sebagainya). Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, yang berusaha mendeskripsikan hasil analisis yang dilakukan peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data konten atau kajian isi, yaitu salah satu metode penelitian yang memanfaatkan beberapa prosedur untuk menarik suatu kesimpulan dari data yang sah dari beberapa dokumen (jurnal, prosiding seminar, buku, internet, berita online dan lain sebagainya) (Hallam 2018). Data yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan resolusi konflik etnis antara Madura dan Dayak pada kasus Sampit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik yang menghampiri etnis Dayak dan Madura di Sampit menjadi perhatian bersama terutama berkaitan dengan rekonsiliasi dan rekonstruksi. Konflik dengan ben-

tuknya yang beragam memang selalu berakibat adanya korban dan pengorbanan. Oleh karena itu juga seringkali menjadi titik tolak dalam merekonstruksi kesadaran betapa pentingnya kehidupan yang damai dan tenteram. Tragedi Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah telah menjadi pendorong dan motivator bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk kembali menata kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik mereka dalam konteks lokal dan nasional. Bagi mereka, penataan itu merupakan dinamika proses yang berlanjut terus menerus demi menjaga, memelihara serta memperkuat jati diri dan identitas Dayak (Patji, 2003).

Rekonstruksi etnis dengan musyawarah damai berbasis sinergi integratif dilakukan melalui kegiatan tingkat nasional ialah Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (MDAB-BK) yang diadakan di Nam Centre, Jakarta, 22-24 Maret 2002. Pada kesempatan ini bertemu wakil-wakil kelompok yang terlibat konflik dan mereka yang peduli terhadap masalah-masalah konflik sosial. Selain dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan empat gubernur dari Kalimantan serta Jawa Timur, juga wakil-wakil yang hadir meliputi 4 (empat) propinsi di Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) serta dari Jawa Timur. Pertemuan tersebut berhasil memperoleh keputusan melalui penyamaan persepsi bahwa a) Kejadian di Bumi Kalimantan ini adalah musibah, yang harus di terima dengan lapang dada, tawakal dan ikhlas, sehingga dapat memetik hikmah dari kejadian tersebut. Selain itu, masyarakat diminta mawas diri agar kejadian ini adalah yang terakhir dan tidak akan terulang lagi; b) Semua peserta bertekad untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai sehingga seluruh program rekonsiliasi dan rehabilitasi dapat terlaksana dengan baik; c) hal ini memerlukan kerja keras yang ikhlas dari semua pihak, terutama dalam rangka sosialisasi sampai ke akar rumput (masyarakat lapisan bawah), sehingga tidak terjadi salah informasi dan salah interpretasi yang dapat memberi peluang kepada provokator atau anasir lainnya untuk menciptakan kejadian serupa terulang.

Adapun kesamaan tujuan yang dicapai melalui model sinergi integratif yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat dan pemerintah yakni *pertama*, menciptakan suasana aman dan damai, menegakkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan Sumpah Pemuda 1928 untuk mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta mensukseskan program reformasi yang demo-

kratis, anti anarkis dan menghargai kebhinekaan dalam keikaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, pemulangan pengungsi ke pemukiman semula di tempat sebelum mereka mengungsi, yaitu di Kalimantan diatur sebaik-baiknya melalui proses dan pentahapan seperti dimaksud dalam prinsip dasar, dengan tetap menghargai keinginan lain yang muncul. Perlindungan hak-hak sipil bagi para pengungsi seperti atas aset yang mereka miliki.

*Ketiga*, Pemerintah Pusat dan Daerah akan terus menerus melakukan fasilitasi terhadap permasalahan pengungsi dan upaya-upaya kerukunan dan rekonsiliasi. *Keempat*, Jaminan keamanan umum oleh negara dengan dukungan aparat keamanan dan aparat penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat. Menciptakan rasa aman dan saling pengertian serta rasa kebersamaan. Ditegakkannya supremasi hukum berdasarkan keadilan, sehingga tercapai rasa keadilan masyarakat. *Kelima*, penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM). HAM tidak hanya berpotensi untuk dilanggar oleh aparat negara tetapi juga bisa dilanggar oleh warga masyarakat yang lain (rakyat biasa) sehingga setiap pelanggaran HAM bisa dicegah dan ditindak secara adil dan bertanggung jawab. Namun, penegakan hukum dalam masyarakat telah menimbulkan rasa hormat masyarakat terhadap hak orang lain (Hidayat, 2013). *Keenam*, peningkatan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menghilangkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan rasa keadilan sosial dan berwatak mulia, mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendidikan guna meningkatkan peradaban yang lebih maju, melalui program-program yang didukung dana pemerintah maupun swasta (Patji, 2003).

Kesamaan cara bertindak yang berhubungan dengan sosialisasi dan operasionalisasi dari melalui model sinergi integratif ini secara simultan dan sungguh-sungguh menjadikan tujuan musyawarah yang telah dihasilkan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hal yang ingin dicapai meliputi berbagai hal diantaranya: a) Penghentian konflik dan menjaga agar konflik tidak terulang lagi; b) Perwujudan rekonsiliasi di semua strata sosial masyarakat; c) Langkah-langkah nyata dan komprehensif dalam menangani masalah pengungsi untuk merumuskan prinsip-prinsip yang akan digunakan dan titik temu yang ideal dan komprehensif; d) Pelembagaan suatu wadah atau forum yang terdiri dari golongan etnis, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk meredakan dan menyelesaikan konflik antar etnis, antar agama dalam kegiatan keagamaan seperti mesjid, gereja, pura, kelenteng, vihara dan lain-lain; e)

Menghilangkan kecemburuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan cara memberdayakan dan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya; f) Upaya-upaya rehabilitasi yang meliputi mental, sosial ekonomi dan fisik; g) Seluruh upaya yang direncanakan untuk pelaksanaannya mensyaratkan sosialisasi dan bekal-bekal cerdas bagi pihak-pihak khususnya masyarakat akar rumput; h) Meningkatkan secara terus menerus kewaspadaan semua warga bangsa untuk senantiasa mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, demi keutuhan bangsa; i) Proses ini melibatkan seluruh pihak-pihak masyarakat, tokoh adat, agama dan aparat. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menginisiasi dan pelaksanaan sesuai dengan tahapan penyelesaian; j) Pemerintah Daerah agar mendorong pihak terkait secepatnya dan perlu segera dipersiapkan sebagai bagian dari proses penyelesaian secara sistematis; k) Meningkatkan atensi dalam pengembangan wilayah pedalaman; l) Faktor pendukung lain ialah dapat dikembangkannya institusi-institusi pendukung yang harus segera disiapkan pembentukannya seperti Tim Ad Hoc, lembaga adat, pusat kajian lintas etnis, dan lain-lain; dan m) Butir-butir cara tindak tersebut kiranya dapat ditindaklanjuti secara konsisten dan kontinu (Patji, 2003). Selain itu menurut Androfo diperlukan juga adanya rekonstruksi, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi yang melibatkan berbagai unsur dalam memecahkan permasalahan konflik sosial melalui model sinergi integratif menjadi senjata yang diharapkan menjadi jalan tengah resolusi konflik sosial (Androfo, 2021).

## SIMPULAN

Konflik dengan bentuknya yang beragam memang selalu berakibat adanya korban dan pengorbanan. Jika konflik sosial tersebut tidak diselesaikan dengan segera, maka akan berdampak pada banyaknya korban jiwa yang berjatuh seperti yang terjadi pada tragedi Sampit. Tragedi Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan juga ke Palangkaraya. Oleh karena itu, diperlukan adanya resolusi konflik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model sinergi integratif berupa mediasi dan rekonsiliasi dengan mengedepankan budaya musyawarah mufakat dipilih sebagai jalan tengah oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dipelopori oleh menteri dalam negeri dan otonomi daerah, bekerja sama dengan musyawarah damai anak bangsa di bumi Kalimantan

(MDAB-BK) dan Basra (Badan Silaturrahi Ulama Madura) melaksanakan pertemuan dengan melibatkan wakil-wakil kelompok yang terlibat konflik dan mereka yang peduli terhadap masalah-masalah konflik sosial. Selain itu, pertemuan nasional ini dihadiri oleh empat gubernur dari Kalimantan serta Jawa Timur, juga wakil-wakil yang hadir meliputi 4 (empat) propinsi di Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) serta dari Jawa Timur. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang pada intinya selain berorientasi untuk mengungkapkan akar masalah konflik, juga membuat prinsip dasar penyelesaian masalah-masalah konflik sosial. Bagi pemimpin dan tokoh masyarakat Dayak, keterlibatan dalam musyawarah tersebut dan persetujuan terhadap semua keputusan yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk membangun kembali citra “etnisitas” masyarakatnya. Dengan demikian, rekonstruksi, mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi yang melibatkan berbagai unsur dalam memecahkan permasalahan konflik sosial melalui model sinergi integratif menjadi senjata yang diharapkan menjadi jalan tengah resolusi konflik sosial. Sebagai tindak lanjut resolusi konflik sosial, perlu adanya edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat yang kurang terdidik agar tidak mudah terhasut atau terpengaruh perilaku, sikap dan ucapan orang lain. Selain itu, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai menjadi penting untuk diimplementasikan secara langsung dan berkelanjutan di tengah masyarakat majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, F. (2018). Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi. *Global & Policy*, 6 (2), 127-140.
- Androfo, G. (2021). Komunikasi antar Budaya dalam Konflik antar Suku serta Penyelesaiannya pada Suku Dayak dan Madura di Kota Banjarmasin. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Aninsi, N. (2021). *10 Daftar Konflik Sosial di Indonesia*. <https://katadata.co.id/intan/berita/61b8c94075b19/10-daftar-konflik-sosial-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.
- Atem, A. (2022). Konflik Etnik Madura dan Melayu Sambas: Tinjauan Konflik Kekerasan Johan Galtung. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 11(2), 1-16.
- Bashori, K., Madjid, A., Tago, M.Z. (2012). Dinamika Konflik dan Integrasi Antara Etnis Dayak dan Etnis Madura (Studi Kasus di Yogyakarta Malang dan Sampit). *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Afkaruna*, 8(1), 60-79.
- Danandjaja, J. (1997). Metode penelitian kepustakaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 52, 82-92.
- David, J. & Julia. (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collins.
- Denny, E. K., & Walter, B. F. (2014). Ethnicity and Civil War. *Journal of Peace Research*, 51(2), 199-212.
- Gurr, R.T. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton University Press.
- Halawa, Y. A., Arisanty, D., Setiawan, F. A., Muhaimin, M., & Hastuti, K. P. (2022). Mapping of Potential Social Conflicts in the West Banjarmasin District in 2021. *The Innovation of Social Studies Journal*, 4(1), 109-119.
- Hallam, G. 2018. “Creating a Connected Future Through Information and Digital Literacy: Strategic Directions at The University of Queensland Library\*.” *Journal of the Australian Library and Information Association* 67 (1): 42-54.
- Hamdani, R. (2022). Antara Etnosentrisme dan Demokrasi: Konflik Etnis Dayak-Madura. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 100-108.
- Hidayat, Y. (2013). Hubungan sosial antara etnis banjar dan etnis madura di kota banjarasin, *Jurnal Komunitas*, 5 (1), 87-92.
- Ida, R & Dyson, L. (2015). Konflik Sunni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intrareligius pada komunitas di Sampang-Madura. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28, (1), 33-49
- Juwanda, J., & Saffanah, W. M. (2019). Kehidupan etnis madura pasca konflik dengan etnis dayak tahun 1997 di desa pahauman kec. sengah temila kabupaten landak kalimantan barat. *Maharsi*, 1(02), 33-52.
- Khadijah, K. (2018). Model Komunikasi Antarbudaya Etnis Madura Dan Etnis Dayak Di Desa Basawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2(1), 100-110.
- Mumtazinur, M. (2018). Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan: Perspektif Green Thought. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2).
- Nadzifah, S. (2022). Perang Sampit (Konflik Suku Dayak Dengan Suku Madura) Pada Tahun 2001. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(2), 14-18.
- Ningsih, M.R., Alfirdaus, L.K., Sardini, N.H. (2021). Politik Etnik Pasca Konflik Madura- Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 81-93
- Patdji, A. (2003). Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangka Raya (Dari Konflik ke (Re)konstruksi). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (2), 14-34.
- Permana, D & Ahyani, H. (2020). Implementasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 995-1006.
- Prathama, N. A. (2017). Negosiasi Identitas Dalam

- Rekonsiliasi Konflik Antaretnis (Kasus: Relasi Etnis Madura dengan Etnis Dayak). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 110-119.
- Riban, S.M dan Masóed, M. (2002). Analisis alternatif kebijakan resolusi konflik antar etnis Dayak-Madura di Sampit, Kalimantan Tengah. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rosyidi, M.I. (2018). Komunikasi kelompok dalam pemberdayaan masyarakat kampung kelbung pasca konflik Madura-Sampit. *Komunikasi*, 12 (1), 51-62.
- Ruslikan. (2001). Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 14(4), 1-12.
- Sayyaf, M.A. (2023). 5 Contoh Konflik Sosial di Indonesia dan Penyebabnya, Materi Sosiologi Kelas 11 SMA. <https://www.sonora.id/read/423497459/5-contoh-konflik-sosial-di-indonesia-dan-penyebabnya-materi-sosiologi-kelas-11-sma> diakses tanggal 15 Februari 2023.
- Sholeh, M. (2022). Konflik Muslim Madura Vs Dayak Di Sampit Serta Diskursus Kaharingan Sebagai Klaim Agama. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 63-74.
- Sukaryanto dan Rahayu, S.D.I.S. (2012). *Penerimaan Sosial Warga Dayak Terhadap Warga Madura Di Kabupaten Kotawaringin Timur Pasca Konflik Sampit*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Suprpto, W. (2018). Relokasi Masyarakat Madura Di Singkawang Sebagai Bagian Dari Proses Resolusi Pasca Konflik Etnisitas Di Kabupaten Sambas, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 3 (2), 33-40.
- Suryani, D. (2016). Konflik dan resolusi konflik perbandingan di Sambas dan Sampit. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 16.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.